



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya Negara KM. 10 Bukik Limau Sarilamak

Sarilamak, 21 Oktober 2025

Nomor : 900.1.1.2/ 561 /BK-LK/2025  
Lampiran :  
Perihal : **Langkah-Langkah Penyesuaian Anggaran Perangkat Daerah Atas Pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026**

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

di –

Tempat

Dalam rangka menghadapi kondisi fiskal Tahun Anggaran 2026, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2026, terjadi penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada penurunan kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang telah disusun berdasarkan pagu kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian dan rasionalisasi agar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026 tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Untuk itu, diminta kepada seluruh perangkat daerah agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan rasionalisasi RKA-SKPD dengan menyesuaikan kembali alokasi belanja sesuai pagu indikatif yang ditetapkan oleh TAPD.
2. Mengutamakan belanja wajib, mengikat, dan prioritas, khususnya yang mendukung pelayanan dasar masyarakat serta program strategis Pemerintah Daerah.
3. Memastikan ketersediaan anggaran untuk belanja gaji, tunjangan, dan kewajiban ASN, PPPK Paruh Waktu, gaji dan tunjangan Kepala Daerah, DPRD serta Tambahan Penghasilan ASN dan Jasa Kantor.
4. Menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 bidang urusan (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial), sesuai Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 00.8.3.2/180/BUP-LK/VIII/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan SPM Tahun 2026.
5. Memprioritaskan pendanaan program prioritas daerah Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain:
  - a. Pemenuhan UHC (Universal Health Coverage);
  - b. Penanganan TBC;
  - c. Pencegahan dan Penurunan Stunting;
  - d. Pembangunan IKK;
  - e. Penanganan Anak Tidak Sekolah;
  - f. Peningkatan Pendidikan Kesetaraan;

- g. Pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan;
  - h. Peningkatan Status Nagari Maju Berkembang menjadi Mandiri;
  - i. Central of Agro;
  - j. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak;
  - k. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
  - l. Honor Garin dan perwujudan Rumah Ibadah yang layak, sehat, dan ramah anak;
  - m. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Melakukan efisiensi belanja nonprioritas, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, ATK, rapat, lembur, dan belanja operasional lain yang masih dapat dihemat.
  7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta memprioritaskan penggunaan gedung/aula milik pemerintah untuk rapat dan pertemuan.
  8. Meniadakan pengadaan belanja modal kendaraan dinas, PC/laptop, printer, dan pakaian dinas, kecuali untuk kebutuhan Kepala Daerah dan DPRD.
  9. Menyesuaikan penyusunan anggaran tetap berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2026 serta KUA-PPAS Tahun 2026 yang telah disepakati bersama DPRD.
  10. Menyusun ulang RKA-SKPD dengan memperhatikan target kinerja, indikator program, serta konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah.
  11. Berkoordinasi dengan TAPD apabila terdapat kendala dalam proses penyesuaian anggaran dan menyampaikan hasil revisi RKA sesuai jadwal penelaahan yang ditetapkan.

Langkah-langkah penyesuaian ini perlu dilaksanakan secara cermat, efisien, dan akuntabel agar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026 tetap konsisten dengan kebijakan perencanaan daerah, kemampuan keuangan, serta prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat menindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**



**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
**NIP. 19730913 199311 1 001**

**Tembusan:**

1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah;
3. Arsip.

**PLOFON ANGGARAN OPD PADA RAPBD 2026**  
**SETELAH PENYESUAIAN DENGAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2026**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

URAIAN		ALOKASI	SUMBER DANA
<b>BELANJA MENGIKAT</b>			
1	GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.745.161.081	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)
2	GAJI PPPK PARUH WAKTU	40.500.000	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)
		79.500.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)
		6.000.000	1.2.02.01 [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
3	BPJS 4% PPPK Paruh Waktu	5.040.000	1.1 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	BPJS Ketenaga Kerjaan PPPK Paruh Waktu (@Rp.11.700/bln)	982.800	1.2.02.01 [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
5	TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	95.764.639	1.1 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		155.129.638	1.4.01 [DANA UMUM] - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	BPJS TPP ASN 4%	10.035.771	1.1 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR	12.322.000	1.2.02.01 [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
8	PAJAK KENDARAAN DINAS	14.500.000	1.1 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9	BPJS Perangkat Nagari 4%	1.607.249.736	1.1 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>PROGRAM PRIORITAS</b>			
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari untuk Peningkatan Indeks	50.000.000	1.1 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	PKK	250.000.000	1.1 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>BELANJA PENUNJANG</b>			
1	Operasional PD (Penunjang dan Kegiatan OPD Lainnya)	120.582.000	1.1 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		2.882.000	1.2.02.01 [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
		1.536.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)
<b>TOTAL</b>		<b>5.197.185.666</b>	

## PERHITUNGAN GAJI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	OPD	Rek. Belanja	Uraian Belanja	Pagu
1	DPMDN	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.709.059.720
		5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	194.059.604
		5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.150.850
		5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	125.474.300
		5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.175.050
		5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	101.978.633
		5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.694.931
		5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.379
		5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	64.426.439
		5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.223.449
		5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	9.670.396
		5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	268.239.328
		5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	21.165.170
		5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	35.439.740
		5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.628.850
		5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.407.235
		5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.258
		5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	11.137.502
		5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	551.827
		5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1.655.420
			<b>TOTAL</b>	<b>2.745.161.081</b>

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pokja 1

- 1 M. Farid Wajidi, S.Sos
- 2 Flora Prima Syntha, SE,M.Si. M.Sc
- 3 Adrian Wahyudi,SH.MH
- 4 Gusni Yenti, SE
- 5 Afriman Jahar, SE
- 6 Dian Sastra, SE, M.Si
- 7 Delfianti, SE
- 8 Susi Nafiarti, S.Sos
- 9 Vella Mustika Sari, SE